



Efektivitas Pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Distrik Nabire

Erji Rumahorbo¹, Kristian H.P.Lambe², Baharuddin³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 03-07-2025 | Review 07-07-2025 | Revision 12-07-2025 | Accepted 18-07-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Distrik Nabire. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus pada satuan pendidikan dasar dan menengah, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima sekolah. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS telah berjalan sesuai prosedur melalui platform digital seperti ARKAS, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas SDM, pelibatan komite yang masih formal, serta dinamika teknis seperti pencairan dana dan perubahan juknis. Meskipun dana BOS terbukti mendukung kelengkapan sarana belajar, honor guru non-PNS, dan kegiatan siswa, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan nyata dengan alokasi anggaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas manajerial sekolah, fleksibilitas kebijakan berbasis konteks lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memastikan pemanfaatan dana BOS berdampak nyata pada transformasi kualitas pendidikan.

Kata kunci: Dana BOS, pengelolaan keuangan sekolah, mutu pendidikan, partisipasi masyarakat, Distrik Nabire

Abstract

This study investigates the effectiveness of School Operational Assistance (BOS) fund management in enhancing educational quality across primary and secondary institutions in Nabire District. Employing a descriptive qualitative approach with case studies, data were gathered through interviews, observations, and documentation from five schools. Findings reveal that although BOS fund management adheres to regulatory standards via digital platforms like ARKAS, its impact is hindered by limited managerial capacity, delayed fund disbursement, rigid technical guidelines, and insufficient stakeholder participation. Despite these challenges, BOS funds contribute significantly to learning facilities, non-permanent teacher salaries, and student development programs. The study recommends strengthening school managerial competencies, increasing community engagement, and adapting technical policies to local educational contexts to maximize the transformative potential of BOS funding.

Keywords: BOS fund, school financial management, educational quality, community participation, Nabire District

¹E-mail: erji1286@gmail.com

²E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

³E-mail: dr_baharuddin05@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan nasional dan pilar dalam pemerataan sosial. Untuk menunjang operasional pendidikan dasar dan menengah, pemerintah Indonesia sejak tahun 2005 telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan mengurangi beban pembiayaan pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Meski kebijakan ini bersifat nasional, efektivitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas tata kelola di masing-masing daerah.

Kabupaten Nabire, yang terletak di Provinsi Papua Tengah, mencerminkan kompleksitas pelaksanaan Dana BOS di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan akses geografis. Berbagai studi menemukan bahwa tantangan umum dalam pengelolaan Dana BOS meliputi keterlambatan pencairan, pemahaman regulasi yang terbatas, pelibatan komite sekolah yang minim, serta fleksibilitas juknis yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan lokal (Wahid, 2016; Suparno, 2018; Suryani, 2019). Di sisi lain, platform digital seperti ARKAS mulai diperkenalkan untuk memfasilitasi perencanaan dan pelaporan berbasis elektronik, namun masih menghadapi kendala implementasi akibat kesenjangan kapasitas teknis pengelola di tingkat sekolah (Nurdin, 2017).

Pengelolaan Dana BOS tidak hanya berdampak pada pemenuhan sarana prasarana dan operasional pendidikan, tetapi juga mencerminkan tata kelola kelembagaan sekolah secara keseluruhan. Praktik yang transparan dan partisipatif dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik, efektivitas kegiatan pembelajaran, serta motivasi para pemangku kepentingan pendidikan (Mulyadi, 2018; Sumedi, 2017).

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena ketimpangan antara kebijakan BOS secara nasional dengan pelaksanaannya di lapangan masih menjadi masalah nyata, khususnya di daerah seperti Distrik Nabire. Tanpa intervensi berbasis bukti dan pemahaman kontekstual, pemanfaatan Dana BOS berisiko tidak optimal dan gagal mencapai tujuannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kajian ini diharapkan memberikan wawasan empiris untuk penguatan kebijakan dan tata kelola Dana BOS berbasis kondisi lokal.

Tinjauan Literatur

Teori Utama (Grand Theory): Agency Theory

Penelitian ini didasarkan pada *Agency Theory* yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (*principal*) dan pihak pelaksana (*agent*) dalam konteks pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan Dana BOS, pemerintah bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada sekolah sebagai *agent* untuk mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan pendidikan (Ridwan et al., 2024). Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan sebagai mekanisme untuk mengurangi *information asymmetry* dan potensi penyalahgunaan dana oleh agen (Ulum et al., 2022).

Definisi Operasional Konsep Kunci

- **Dana BOS:** Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung belanja non-personalia di satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

- **Pengelolaan Dana BOS:** Merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan Dana BOS di tingkat sekolah. Efektivitas pengelolaan diukur melalui prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Suryadi, 2023).
- **Mutu Pendidikan:** Mengacu pada pencapaian standar pendidikan nasional yang mencakup hasil belajar siswa, kompetensi guru, sarana prasarana, dan proses pembelajaran. Mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran dan partisipatif (Suryanthi et al., 2024).
- **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan aktif komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan Dana BOS. Partisipasi ini menjadi indikator transparansi dan kontrol sosial (Hasniaty et al., 2024).

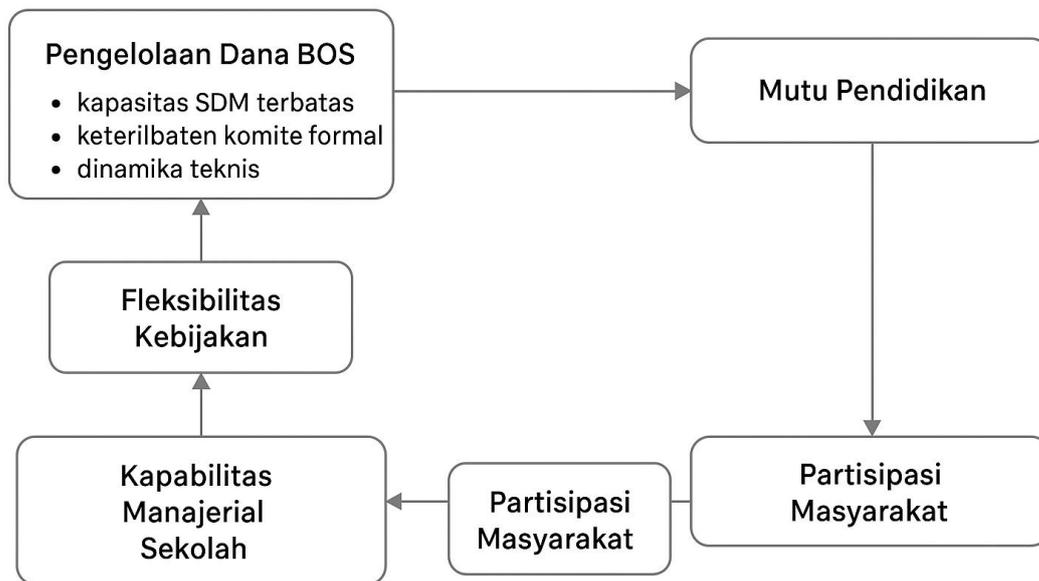
Literatur Terkini yang Mendukung

- Ridwan, M., Charista, M. D., & Janie, D. N. A. (2024). *The Determinants of School Operational Assistance Fund Management*. Atlantis Press. Studi ini menunjukkan bahwa *good governance, performance-based budgeting*, dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS.
- Suryanthi, I. G. A. E., Atmadja, A. T., & Purnamawati, I. G. A. (2024). *The effect of good school governance on school education quality: The moderating role of BOS fund effectiveness*. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 26–48. Penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh langsung terhadap mutu pendidikan, dengan efektivitas Dana BOS sebagai mediator.
- Sahdan. (2023). *Effectiveness of Accountability and Transparency of BOS Fund Management Using the ARKAS Application*. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 5(2), 176–186. Studi ini menyoroti peran aplikasi ARKAS dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah.
- Hasniaty, H., et al. (2024). *School Operational Assistance Fund Management Strategy in Improving Quality and Achievement*. *YUME: Journal of Management*, 7(2). Penelitian ini menekankan pentingnya strategi manajemen BOS berbasis SWOT untuk meningkatkan daya saing dan mutu pendidikan.
- Nurisnain, M. M., & Mursyidah, L. (2024). *Evaluation of the Management Policy of BOS Funds in Elementary Schools*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). Studi ini menggunakan kerangka evaluasi Wirawan (input-process-output-impact) untuk menilai efektivitas pengelolaan Dana BOS secara sistematis.

Alur Pikir Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menggambarkan alur pikir dari penelitian ini dalam Gambar 1 berikut.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Pemikiran pribadi penulis (2025)

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan dasar dan menengah di Distrik Nabire, Papua Tengah. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan holistik, terutama dalam situasi di mana batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin, 2018). Pendekatan ini relevan untuk menggali dinamika lokal, tantangan implementasi kebijakan, serta persepsi para pemangku kepentingan pendidikan terhadap efektivitas Dana BOS.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh satuan pendidikan penerima Dana BOS di Distrik Nabire, baik jenjang SD, SMP, maupun SMK. Sampel dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan representasi geografis, jenjang pendidikan, dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan Dana BOS. Lima sekolah dipilih sebagai unit kasus, yaitu SD Negeri Inpres Siritwini, SMP Negeri 1 Nabire, SMP Negeri 3 Nabire, SMK Negeri 1 Nabire, dan satu sekolah tambahan yang mewakili konteks pendidikan dasar. Teknik purposive sampling digunakan karena memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015).

Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, tim BOS sekolah, komite sekolah, serta guru yang terlibat dalam perencanaan dan pelaporan Dana BOS. Jumlah informan sebanyak 15 orang, dengan distribusi yang merata di setiap sekolah. Pemilihan informan mempertimbangkan keterwakilan peran dan kedalaman informasi yang dapat diberikan, sesuai dengan prinsip triangulasi sumber dalam penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian berada di Distrik Nabire, Papua Tengah, yang dipilih karena karakteristik geografisnya yang menantang serta kompleksitas dalam pengelolaan Dana BOS. Penelitian dilaksanakan selama Februari hingga Mei 2025, mencakup tahap observasi lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Waktu ini dipilih karena bertepatan dengan siklus pelaporan Dana BOS semester pertama, sehingga memungkinkan peneliti mengamati proses perencanaan dan pelaksanaan secara langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh para pengelola Dana BOS. Observasi dilakukan terhadap kegiatan rapat tim BOS, penyusunan RKAS, dan pelaporan melalui aplikasi ARKAS. Dokumentasi meliputi RKAS, laporan realisasi anggaran, dan notulen rapat. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi metode (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan induktif. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan terhadap fokus penelitian, kemudian disusun dalam tema-tema seperti transparansi, partisipasi, efektivitas, dan kendala teknis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan praktik pengelolaan Dana BOS di masing-masing sekolah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan memverifikasi temuan melalui diskusi dengan informan dan pemeriksaan dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Tabel berikut menyajikan karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Nama Responden	Jabatan/Peran	Institusi/Sekolah	Jenjang Pendidikan	Pengalaman (Tahun)
1	Ibu Winarsih	Bendahara BOS	SMK Negeri 1 Nabire	SMK	8
2	Marthinus	Bendahara BOS	SMP Negeri 1 Nabire	SMP	6
3	Bendahara BOS	Bendahara BOS	SMP Negeri 3 Nabire	SMP	5
4	Komite Sekolah	Perwakilan Komite	SD Negeri Inpres Siritwini	SD	4
5	Bendahara BOS	Bendahara BOS	SD Negeri Inpres Siritwini	SD	7
6	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah	SD/SMP/SMK (bervariasi)	SD/SMP/SMK	10+
7	Guru Tim BOS	Anggota Tim BOS	SD/SMP/SMK (bervariasi)	SD/SMP/SMK	5-10

Sumber: Data primer diolah (2025)

Responden terdiri dari bendahara BOS, kepala sekolah, komite sekolah, dan guru

yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana BOS. Mereka berasal dari lima sekolah berbeda yang mewakili jenjang SD, SMP, dan SMK. Pengalaman mereka berkisar antara 4 hingga lebih dari 10 tahun, menunjukkan kapasitas informatif yang relevan untuk menggambarkan praktik pengelolaan Dana BOS secara kontekstual.

Pengelolaan Dana BOS di Sekolah-Sekolah di Distrik Nabire

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh sekolah telah menggunakan aplikasi ARKAS dalam perencanaan dan pelaporan Dana BOS. Proses pengelolaan dilakukan melalui tahapan perencanaan (penyusunan RKAS), pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan digital. Di SD Negeri Inpres Siritwini, bendahara menyatakan:

"Kami menyusun RKAS bersama kepala sekolah dan tim BOS, lalu input ke ARKAS. Semua penggunaan dana harus sesuai rencana, dan laporan dikirim ke dinas secara berkala." (Hasil wawancara, 2025)

Namun, partisipasi komite sekolah masih bersifat formal. Seorang perwakilan komite menyampaikan:

"Kami hanya diminta tanda tangan, tidak ikut menyusun anggaran. Padahal kami ingin tahu dana digunakan untuk apa saja." (Hasil wawancara, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan sudah digital dan terstruktur, aspek partisipatif belum optimal.

Kontribusi Dana BOS terhadap Mutu Pendidikan

Dana BOS terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Di SMP Negeri 1 Nabire, bendahara menyebut:

"Dana BOS sangat membantu untuk beli buku, alat tulis, dan bayar honor guru honorer. Tanpa BOS, kegiatan belajar bisa terganggu." (Hasil wawancara, 2025)

Di SMK Negeri 1 Nabire, dana digunakan untuk mendukung praktik kejuruan dan pelatihan siswa. Ibu Winarsih menjelaskan:

"Kami pakai BOS untuk beli alat praktik dan bahan habis pakai. Ini penting agar siswa siap kerja." (Hasil wawancara, 2025)

Kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan guru, dan program literasi juga didanai oleh BOS, menunjukkan bahwa dana ini berperan dalam aspek akademik dan non-akademik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lima sekolah, ditemukan sejumlah faktor yang secara konsisten memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana BOS di Distrik Nabire:

1. Keterlambatan Pencairan Dana

Seluruh informan menyebutkan bahwa pencairan Dana BOS sering tidak sesuai jadwal. Hal ini menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAS tertunda atau bahkan dibatalkan. Bendahara SMK Negeri 1 Nabire menyatakan:

"Dana baru masuk saat semester sudah berjalan. Kami harus menyesuaikan ulang kegiatan, padahal sudah direncanakan sejak awal tahun." (Hasil wawancara, 2025)

2. Ketidaksesuaian Juknis dengan Kebutuhan Lokal

Juknis BOS nasional dinilai terlalu kaku dan tidak fleksibel terhadap kebutuhan spesifik, terutama di sekolah kejuruan. Misalnya, pengadaan alat praktik otomotif atau bahan habis pakai tidak dapat diakomodasi sepenuhnya. Ibu Winarsih menambahkan:

"Kami butuh alat praktik yang mahal, tapi juknis tidak memberi ruang untuk itu. Akhirnya kami hanya bisa beli yang standar." (Hasil wawancara, 2025)

3. Keterbatasan SDM dan Pemahaman Teknis

Sebagian guru dan staf belum terbiasa menggunakan aplikasi ARKAS dan SIPLah. Hal ini menyebabkan kesalahan input, keterlambatan pelaporan, dan beban kerja yang tinggi bagi bendahara. Di SMP Negeri 3 Nabire, bendahara menyampaikan:

"Guru belum paham ARKAS, jadi saya harus jelaskan satu-satu. Kadang mereka tidak tahu bahwa kegiatan harus sesuai dengan yang sudah diinput." (Hasil wawancara, 2025)

4. Minimnya Partisipasi Komite Sekolah dan Masyarakat

Komite sekolah umumnya hanya dilibatkan secara formal, seperti menandatangani laporan, tanpa keterlibatan aktif dalam perencanaan atau evaluasi. Perwakilan komite SD Negeri Inpres Siritwini menyebut:

"Kami ingin dilibatkan sejak awal, bukan hanya saat laporan sudah jadi. Kalau tahu rencananya, kami bisa bantu awasi." (Hasil wawancara, 2025)

5. Beban Administratif yang Tinggi

Pengelolaan Dana BOS melalui sistem digital memang meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menambah beban administratif. Bendahara SMP Negeri 1 Nabire mengeluhkan:

"Input ARKAS dan SIPLah itu makan waktu. Kalau ada error, saya harus ulang dari awal. Padahal saya juga mengajar." (Hasil wawancara, 2025)

6. Monitoring Eksternal yang Belum Optimal

Pengawasan dari dinas pendidikan belum dilakukan secara rutin dan mendalam. Sekolah merasa berjalan sendiri tanpa pendampingan teknis yang memadai. Informan dari SMP Negeri 3 Nabire menyampaikan:

"Kami jarang didampingi langsung. Kalau ada kesalahan, baru diberi tahu saat audit. Padahal kami butuh arahan sejak awal." (Hasil wawancara, 2025)

7. Keterbatasan Dana terhadap Kebutuhan Nyata

Dana BOS yang diterima belum mampu menjawab seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan mutu pendidikan. Sekolah harus melakukan prioritas yang ketat, dan beberapa program strategis terpaksa ditunda. Di SMP Negeri 1 Nabire, bendahara menyatakan:

"Kebutuhan makin banyak, tapi dana tetap. Kami harus pilih mana yang paling mendesak." (Hasil wawancara, 2025)

Temuan ini memperkuat bahwa efektivitas pengelolaan Dana BOS tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas SDM, partisipasi stakeholder, dan dukungan kebijakan yang adaptif. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, Dana BOS dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi mutu pendidikan di daerah tertinggal seperti Distrik Nabire.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana BOS di sekolah-sekolah Distrik Nabire telah dijalankan secara prosedural melalui sistem digital seperti ARKAS, yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas. Pelibatan pihak sekolah dan tim BOS menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas SDM, pemahaman teknis, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dana BOS terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan. Alokasi dana telah mendukung penyediaan sarana pembelajaran, pembayaran honor guru non-PNS, serta pelaksanaan kegiatan pengembangan minat dan bakat. Di sekolah kejuruan, dana BOS turut memperkuat kompetensi vokasional siswa melalui penyediaan alat praktik dan pelatihan bersertifikat.

Meski sistem pengelolaan bersifat formal dan terstruktur, masih ditemukan tantangan dalam fleksibilitas kebijakan, keterlibatan masyarakat, serta kesenjangan antara kebutuhan sekolah dengan ketentuan juknis. Partisipasi komite sekolah masih terbatas, sementara monitoring eksternal dari dinas pendidikan belum optimal dan cenderung reaktif.

Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi pentingnya peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan, pelibatan aktif masyarakat dalam siklus anggaran, dan reformasi juknis yang lebih kontekstual. Sementara itu, secara teoretis, penelitian ini menegaskan validitas *Agency Theory* sebagai kerangka untuk memahami relasi antara pemerintah dan sekolah dalam tata kelola anggaran pendidikan.

Pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal merupakan jalan menuju optimalisasi Dana BOS sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Ketika pengawasan, transparansi, dan adaptasi regulasi berjalan seiring, Dana BOS tidak sekadar menjadi pelengkap operasional, melainkan menjadi alat transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada cakupan geografis Distrik Nabire dan bersifat kualitatif, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas ke wilayah lain. Wawancara dan dokumentasi bersifat deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif terhadap capaian pembelajaran. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*), memperluas lokasi studi ke distrik lain, dan mengintegrasikan analisis dampak BOS terhadap hasil belajar siswa menggunakan indikator kinerja terukur. Selain itu, studi longitudinal akan memperkaya evaluasi terhadap perubahan kualitas pendidikan dari waktu ke waktu.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2018). *Mutu pendidikan: Teori dan praktik dalam pengelolaan pendidikan yang berkualitas*. PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2014). *Standar nasional pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dori, H. P., Lambe, K. H. P., & Sabandar, S. Y. (2025). ANALISIS DAMPAK SISTEM PELAYANAN KAS DAERAH ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH DI BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA NABIRE. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 27-34. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/853>

- Gagne, R. M. (2016). *The conditions of learning and theory of instruction*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Halik, J. B., Parawansa, D. A. S., Sudirman, I., & Jusni, J. (2023). Implications of IT Awareness and Digital Marketing to Product Distribution on the Performance of Makassar SMEs. *유통과학연구 Journal of Distribution Science*, 21(7), 105–116. <https://doi.org/10.15722/jds.21.07.202307.105>
- Halik, J. B., & Halik, M. Y. (2024). Open Innovation And Digital Marketing : A Catalyst For Culinary SMEs In Makassar. *Jurnal Manajemen*, 28(03), 588–612. <https://doi.org/10.24912/jm.v28i3.2059>
- Hasniaty, H., Saputra, S., & Adiputra, Y. (2024). School operational assistance fund management strategy in improving quality and achievement. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 33–45.
- Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 32–42. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan pengelolaan dana BOS tahun 2021*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, M. (2018). Pengelolaan dana BOS dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 6(2), 59–72.
- Nurisnain, M. M., & Mursyidah, L. (2024). Evaluation of the management policy of BOS funds in elementary schools. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4), 112–121.
- Nurdin, M. (2017). Pengelolaan dana BOS: Teori dan praktik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Administrasi*, 15(1), 47–56.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Ridwan, M., Charista, M. D., & Janie, D. N. A. (2024). The determinants of school operational assistance fund management. In *Proceedings of the 7th International Conference on Education and Technology (ICET)* (pp. 98–103). Atlantis Press.

- Sahdan, S. (2023). Effectiveness of accountability and transparency of BOS fund management using the ARKAS application. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 5(2), 176–186.
- Sumedi, A. (2017). Pengaruh penggunaan dana BOS terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan*, 14(2), 45–52.
- Suparno, S. (2018). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 22(3), 203–215.
- Suryanthi, I. G. A. E., Atmadja, A. T., & Purnamawati, I. G. A. (2024). The effect of good school governance on school education quality: The moderating role of BOS fund effectiveness. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 26–48.
- Suryani, A. (2019). *Manajemen keuangan sekolah dan pengelolaan dana BOS*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, R., Lambe, K. H. P., & Gunadi, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Yayasan Kristen Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 47–55. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.301>
- Supriyono, T. (2016). *Evaluasi hasil belajar siswa: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Tarman, B. (2017). *Kompetensi guru dalam pendidikan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Ulum, I., Ghozali, I., & Purwanto, H. (2022). Accountability practices in school governance: The agency theory perspective. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 1–14.
- Wahid, A. (2016). Evaluasi pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar di daerah terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 23–31.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.